

PENGARUH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Mispa Tarigan¹, Jef Rudiantho Saragih², Dadang Subarna³, Ringkop Situmeang⁴

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Pascasarjana
Universitas Simalungun

ABSTRAK

Pengembangan wilayah di Kota Pematangsiantar sangat penting dilaksanakan untuk memenuhi wilayah perumahan pemukiman. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Kebijakan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Wilayah di Kota Pematangsiantar. Kebijakan pembangunan perumahan pemukiman merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan fasilitas hunian bagi masyarakat. Sampel penelitian sebesar 100 rumah tangga. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dan pengujian hipotesis dengan Uji-F dan Uji-t. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan pemukiman dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan kebijakan perumahan pemukiman dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan pemukiman hendaknya RT, RW, RDTR, dan peraturan zonasi disosialisasikan melalui metode dan media.

Kata Kunci : Kebijakan, Perumahan, Partisipasi Masyarakat, Pematangsiantar

ABSTRACT

Regional development in Pematangsiantar City is very important to be implemented to fulfill residential housing areas. The purpose of this study was to analyze the influence of housing development policies and community participation on regional development in Pematangsiantar City. Residential housing development policy is a government program that aims to provide residential facilities for the community. The research sample is 100 households. This study uses Multiple Linear Regression analysis and hypothesis testing with the F-test and t-test. The results of the study concluded that residential housing development policies and community participation had an effect on the Regional Development of the City of Pematangsiantar. It can be concluded that simultaneously residential housing policies and community participation have a positive and significant effect on the Regional Development of Pematangsiantar City. To increase community participation in residential housing development, RT RW, RDTR, and zoning regulations should be socialized through methods and media

Keywords : Policy, Housing, Community Participation, Pematangsiantar

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan merupakan tanggungjawab semua elemen masyarakat. Pembangunan merupakan wadah mengoperasionalkan kebutuhan kedalam kegiatan pemerintahan. Salah satu pembangunan yang dibutuhkan masyarakat adalah ketersediaan rumah tempat tinggal. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut menjadi



indikator keberhasilan pembangunan. Kebijakan dan strategi merupakan kegiatan operasional dan teknis yang mewujudkan ketersediaan rumah tempat tinggal bagi masyarakat. Merumuskan kebutuhan tempat tinggal masyarakat merupakan langkah strategis pemerintah wujud dari pembangunan secara berkelanjutan.

Pembangunan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat menjadi tolak ukur pertumbuhan penduduk. Sinergitas program pembangunan menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan perumahan. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan merupakan faktor penting dalam menyukkseskan pembangunan.

Memang harus diakui bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman membutuhkan dukungan besar dari semua sektoral pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian akan memberikan dampak bagi ketersediaan perumahan dan pemukiman. Keberadaan lahan perumahan dan pemukiman merupakan dasar penyusun rencana kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman. Keberadaan dana untuk membiayai pembangunan perumahan dan pemukiman menjadi sangat krusial dan bahkan keterbatasan dana menjadi dasar menyusun rencana kerja pembangunan perumahan mengalami permasalahan tersendiri. Pembangunan pemukiman perumahan akan menjadi dasar pemerintahan Kota Pematangsiantar mengambil kebijakan, dan memberikan fungsi pemerintahan dengan maksimal baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial.

Menguatkan partisipasi masyarakat merupakan modal pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan pemukiman dapat ditampilkan dengan menampilkan sikap, perilaku dan tindakan yang mendukung pembangunan perumahan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan pemukiman dengan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pembangunan perumahan pemukiman yang akan dilakukan maupun yang sudah dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat menjadi motor penggerak bagi percepatan pembangunan perumahan dan pemukiman. Kehadiran partisipasi masyarakat akan mempercepat tercapainya visi dan misi pembangunan kota Pematangsiantar khususnya pembangunan perumahan. Keberadaan perumahan pemukiman menjadi penopang pembangunan kota Pematangsiantar. Kebijakan dan strategi pembangunan perumahan menjadi langkah operasional dalam mengimplementasikan program pembangunan perumahan. Kebijakan dan strategi pembangunan perumahan akan berhadapan dengan kegiatan yang dilakukan dunia usaha, kegiatan masyarakat dan kegiatan kepentingan lainnya.

Kemampuan pemerintah mengeluarkan kebijakan dan strategi pembangunan akan menambah pengembangan wilayah. Kebijakan dan strategi pembangunan membutuhkan langkah operasional dan teknis dari Pemerintah Kota Pematangsiantar dan pelaku perumahan dan pemukiman. Pembangunan perumahan dan pemukiman adalah contoh kecil dalam kebijakan dan strategi pembangunan. Strategi pembangunan perumahan dan pemukiman membutuhkan partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan menjadi barometer keberhasilan pembangunan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Kebijakan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Wilayah di Kota Pematangsiantar.”



METODE PENELITIAN

Defenisi variabel penelitian, indikator dan ukuran yang dipakai dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Ukuran
Kebijakan Perumahan dan Pemukiman	Kebijakan yang di buat oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang dilakukan pemerintah.	1. Mempermudah Penyelesaian Masalah 2. Mempermudah prosedur 3. Mempermudah Pembangunan 4. Mempermudah memiliki 5. Memberikan kenyamanan	Skala Likert
Partisipasi Masyarakat	Keikutsertaan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.	1. Keikutsertaan masyarakat 2. Mendukung hasil keputusan 3. Ikut melaksanakan 4. Mengawasi yang dikerjakan 5. Menjaga yang telah dilaksanakan	Skala Likert
Pengembangan wilayah	Merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan Pembangunan yang terencana	1. Kesejahteraan masyarakat Meningkat 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Peningkatan Kualitas Hidup 4. Menjaga Kelestarian Lingkungan 5. Pembangunan yang merata	Skala Likert

Populasi, Sampel dan Unit Analisis

Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu dengan alasan kriteria sampel yang diperoleh benar - benar sesuai dengan fenomena penelitian yang akan dilakukan. Ukuran sampel atau jumlah sampel yang digunakan dalam pengisian data kuesioner pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin (dalam Arikunto, 1998) yaitu : dimana n adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi, dan E adalah toleransi terjadinya galat (1%). Dengan menggunakan rumus di atas, maka jumlah populasi sebanyak 58.803 rumah tangga, maka jumlah sampel yang diperoleh adalah:

$$n = 58.803 / 58.803 (0,1)^2 + 1$$

$$= 99,8302 \text{ (dibulatkan 100)}$$

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan tertutup diberikan kepada responden
2. Untuk mendukung data pendukung dari penyebaran daftar pertanyaan tersebut, maka data sekunder diusahakan melalui meninjau lokasi penelitian, mengambil data dari dokumentasi dan buku yang berkaitan dengan fenomena penelitian.

Teknik Analisis Data

Instrumen Penelitian. Untuk dapat mengkuantitatifkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan (*kuesioner*) yang telah dijawab oleh para responden. Sementara itu butir - butir



pertanyaan kuesioner dibuat dalam bentuk pilihan ganda, di mana setiap butir pertanyaan terdiri dari lima alternatif jawaban. Kemudian data jawaban para responden diberi skor dengan menggunakan sistem *Skala Likert*.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Pada penelitian ini, kuesioner diisi oleh responden. Sebelum kuesioner disebar ke seluruh responden, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada responden, untuk mengetahui apakah kalimat - kalimat dalam kuesioner cukup dimengerti, dengan tujuan untuk pembenahan

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik menganalisa data dalam penelitian adalah data yang sudah terkumpul akan ditabulasi dan analisa memakai alat bantu SPSS 22. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana (untuk melihat pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat) dan regresi linear berganda (untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan pengaruh bersamanya). Teknik analisa data dimaksudkan sebagai pembuktian hipotesis penelitian (apakah diterima atau tidak). Untuk mengetahui hipotesis diterima ditolak, maka digunakan regresi linier berganda, dengan rumus model persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

dimana Y adalah Pengembangan Wilayah, X_1 adalah Kebijakan Perumahan Pemukiman, dan X_2 adalah Partisipasi Masyarakat.

Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen

Uji Validitas. Validitas data diartikan bahwa data yang diperoleh akurat valid instrumen dalam penelitian dapat dikatakan valid dimana alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Bila skala pengukuran tidak valid maka skala ukur itu tidak ada manfaatnya karena tidak mengukur apapun. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat validitasnya maka alat ukur tersebut semakin menunjukkan mengenai sasarannya. Teknik pengujian validitas dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 %; dimaksudkan untuk mengetahui keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan cara mengkorelasikan antara item pertanyaan terhadap skor total. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka variabel tersebut valid. Jika r_{hitung} tidak positif serta $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka variabel tersebut tidak valid.

Uji Realibilitas. Dalam penelitian ini pengukuran reliabilitas kuesioner melalui uji statistik Cronbach Alpha (α) dengan program SPSS for windows. Menurut Nunnally (dalam Ghozali, 2006) suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ pada hasil pengujian.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2). Uji determinasi ditujukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Dengan menggunakan analisa SPSS 22, maka diperoleh tabel koefisien Determinasi (R^2) atau tabel uji (R^2) disebut juga tabel uji determinasi (*model Summary*).

Uji F (Uji Serempak). Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan Uji F dengan kriteria pengambilan keputusan jika F_{hitung} lebih besar ($>$) dari F_{tabel} ; maka H_0



ditolak dan H_1 akan diterima. Pengaruh Variabel bebas terhadap variabel terikat akan diuji pada tingkat kepercayaan 95 % atau tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$; Kriteria pengujian hipotesis secara bersama sama (simultan) adalah H_0 diterima (artinya H_1 ditolak) jika F_{tabel} pada $\alpha = 5\%$; H_0 ditolak (artinya H_1 diterima) jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

Uji t (Uji Parsial). Teknik analisa dengan menggunakan uji t dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian hipotesis penelitian parsial (sederhana) adalah sebagai berikut : (1) $H_0: b_1 = 0$; artinya kebijakan Pembangunan perumahan dan pemukiman tidak berpengaruh terhadap pengembangan disimpulkan bahwa tiap item dalam Uji Validitas Jawaban Kebijakan dinyatakan valid. Tabel hasil analisis Uji validitas Jawaban responden terhadap variabel Kebijakan Pembangunan Perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Validitas Jawaban Kebijakan

Item	r_{hitung}	$r_{tabel} (N=100, \alpha = 5\%)$	Kesimpulan
P1	0.613	0.195	Valid
P2	0.754	0.195	Valid
P3	0.848	0.195	Valid
P4	0.798	0.195	Valid
P5	0.857	0.195	Valid

Tabel 3. Uji Validitas Jawaban Partisipasi Masyarakat

Item	r_{hitung}	$r_{tabel} (N=100, \alpha = 5\%)$	Kesimpulan
P1	0.786	0.195	Valid
P2	0.602	0.195	Valid
P3	0.811	0.195	Valid
P4	0.544	0.195	Valid
P5	0.771	0.195	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 3 diketahui nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan lebih besar dari 0,195 maka dapat disimpulkan bahwa tiap item dalam Uji Validitas Jawaban partisipasi masyarakat dinyatakan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

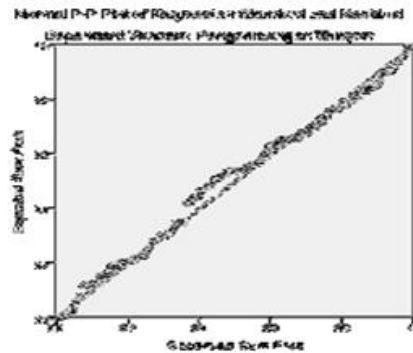
Uji Validitas Jawaban Kebijakan. Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 2 diketahui nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan lebih besar dari 0,195 maka dapat hasil uji validitas diketahui nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan lebih besar dari 0,195 maka dapat disimpulkan bahwa Jawaban Pengembangan Wilayah dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas. Reliabilitas merupakan ketepatan atau *consistency* atau dapat dipercaya, yang artinya akan memberikan hasil yang sama meskipun diulang – ulang dan dilakukan oleh siapa dan kapan saja. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai *Croanbach's Alpha* lebih besar atau sama dengan 0,60.



Tabel 4. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel Penelitian	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Kesimpulan
1.	Kebijakan	0.800	Reliabel
2.	Partisipasi Masyarakat	0.778	Reliabel
3.	Pengembangan Wilayah	0.610	Reliabel



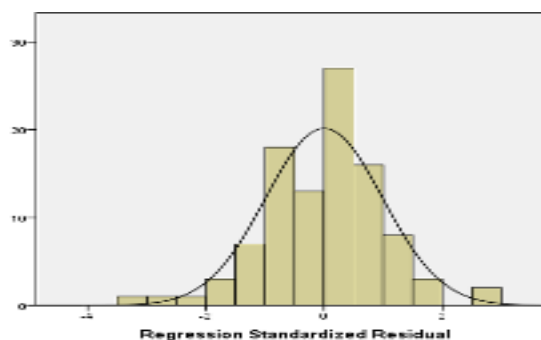
Gambar 1. Grafik Histogram

Pada Gambar 1 grafik P-P Plot terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa model garis regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.



Gambar 2. Grafik Normal P-P Plot

Uji Multikolonierisitas.

Uji multikolinearitas untuk mengetahui adanya hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi, uji multikolonierisitas dijelaskan pada Tabel 5.

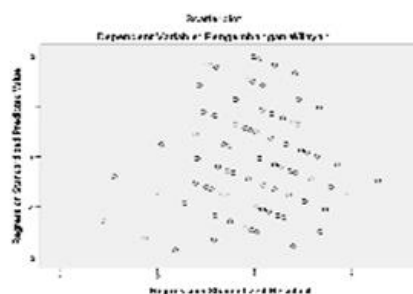
Tabel 5. Uji
Multikolinearitas

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	Kebijakan	.922	.529	.224	.152	6.588
	Partisipasi Masyarakat	.906	.380	.147	.152	6.588

Pada uji multikolenearitas, jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi. Berdasarkan hasil tersebut maka dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Antara variabel - variabel bebas, yaitu kebijakan dan partisipasi karena VIF lebih kecil dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,1

Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah *homoskedastik* yaitu semua gangguan memiliki varians yang sama, (Gujarati, 2005). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan gambar *scatterplot*, apabila titik - titik menyebar dibawah dan diatas angka 0, dan titik - titik tidak membentuk pola maka dapat disimpulkan model regresi terhindar dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa titik - titik menyebar dibawah dan diatas angka 0, serta tidak membentuk pola maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat unsur heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Nilai DW 1,673, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel 100 (n) dan jumlah variabel independen 2 (K = 2) maka diperoleh nilai du 1,715. Nilai DW 1,673 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,715 dan kurang dari (4-du) 4-1,715 = 2,285 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 6. Hasil Uji
Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.933 ^a	.871	.869	.788	1.673

Analisis Regresi

Hasil analisis Regresi Kebijakan Pembangunan perumahan pemukiman dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Wilayah

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.327	0.363		17.453	0.000
	Kebijakan	0.330	0.054	0.574	6.139	0.000
	Partisipasi Masyarakat	0.243	0.060	0.378	4.044	0.000

Berdasarkan hasil analisa regresi melalui pengolahan Program aplikasi SPSS diperoleh model Persamaan regresi linier berganda: $Y = 6,327 + 0,330X_1 + 0,243X_2$. Persamaan regresi linier berganda tersebut memberi arti bahwa, setiap kegiatan peningkatan pada variabel Kebijakan perumahan pemukiman satu satuan akan berpengaruh dalam meningkatkan Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar sebesar 0,330 satuan. Setiap kegiatan peningkatan pada variabel Partisipasi Masyarakat satu satuan akan berpengaruh dalam meningkatkan Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R Square).

Dari Tabel 8 diketahui koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,871 atau 87,1%. Hasil tersebut berarti kebijakan perumahan pemukiman dan partisipasi masyarakat dapat menjelaskan variasi sedangkan sisanya sebesar 12,9 % lagi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.933 ^a	0.871	0.869	0.788	1.673

Uji Serempak (Uji F).

Pengujian Hipotesis penelitian sevara serempak dilakukan dengan Uji F yaitu dengan membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , dengan kriteria pengambilan keputusan adalah: (1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ H_0 diterima atau H_1 ditolak; dan (2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ H_0 ditolak atau H_1 diterima.

Berdasarkan analisis variansi di atas, hasil pengujian serempak bahwa $F_{hitung} = 328,59$. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$. $df - 1$ (jumlah variabel - 1) atau $3 - 1 = 2$, dan $df 2$ ($n - k - 1$) atau $100 - 2 - 1 = 97$ maka diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 328,59 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 1,46. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 yang menyatakan tidak ada pengaruh kebijakan perumahan pemukiman dan partisipasi masyarakat secara bersama - sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar ditolak dan menerima H_1 . Dapat disimpulkan bahwa kebijakan perumahan pemukiman dan partisipasi masyarakat secara bersama - sama



berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar.

Tabel 9. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	407.807	2	203.904	328.590	0.000
	Residual	60.193	97	0.621		
	Total	468.000	99			

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial dilakukan dua arah, menggunakan tingkat signifikansi alpha 0,05/2 (0,025). Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung dengan nilai ttabel dengan kriteria pengambilan keputusan adalah :

Jika thitung < ttabel H0 diterima atau H1 ditolak

Jika thitung > ttabel H0 ditolak atau H1 diterima

Tabel 10. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.327	0.363		17.453	0.000
	Kebijakan	0.330	0.054	0.574	6.139	0.000
	Partisipasi Masyarakat	0.243	0.060	0.378	4.044	0.000

Nilai thitung untuk variabel kebijakan (6,139) lebih besar dibandingkan dengan ttabel (1,292) atau nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari alpha (0,05/2). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh kebijakan perumahan pemukiman terhadap Pengembangan Wilayah ditolak dan menerima H1. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan perumahan pemukiman secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar

Nilai thitung untuk variabel partisipasi masyarakat (4,044) lebih besar dibandingkan dengan ttabel (1,292) atau nilai sig (0,000) lebih kecil dari alpha (0,05/2). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh partisipasi masyarakat secara parsial terhadap Pengembangan Wilayah ditolak dan menerima H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar.

Kebijakan

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas adalah Kebijakan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan partisipasi masyarakat dan variabel terikat adalah Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan perumahan pemukiman dan partisipasi masyarakat dapat menjelaskan variasi Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar sebesar 87,1%, sedangkan sisanya sebesar 12,9% lagi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Kebijakan perumahan pemukiman dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar yang dijelaskan dengan model Persamaan regresi linier berganda: $Y = 6,327 + 0,330X_1 + 0,243X_2$.



Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan Budiharjo (1998:4) mengatakan bahwa Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain, konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama manusia yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya. Kebutuhan perumahan bagi masyarakat menjadi salah satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi maksimal melalui kebijakan yang dikeluarkan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Memang harus diakui bahwa keterbatasan dana, keterbatasan sarana dan prasarana lainnya, keterbatasan tanah/lokasi dan sebagainya menjadikan pembangunan perumahan dan pemukiman. Berkaitan dengan fungsi rumah, (Turner, 1972) mengatakan bahwa terdapat tiga fungsi yang terkandung dalam rumah, yaitu: 1) Rumah sebagai penunjang identitas keluarga, yang diwujudkan dalam kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan rumah. Kebutuhan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni mempunyai tempat tinggal atau berteduh secukupnya untuk melindungi keluarga dari iklim setempat; 2) Rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi atau fungsi pengembangan keluarga. Fungsi ini diwujudkan dalam lokasi tempat rumah itu didirikan. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan; 3) Rumah sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya kehidupan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah, jaminan keamanan lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan; dan 4) Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, perwujudannya bervariasi menurut siapa penghuni atau pemiliknya.

Kebijakan dan strategi perumahan dan pemukiman merupakan kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan kebutuhan ketersediaan perumahan pemukiman yang dibutuhkan masyarakat. Berbagai keterbatasan menjadi penghambat dan pengganggu kegiatan pembangunan perumahan pemukiman. Kebutuhan masyarakat bertambah sesuai dengan pertumbuhan masyarakat. Kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan kebijakan yang harus diambil pemerintahan daerah sebagai Elemen – Elemen Sistem Kebijakan Publik sebagai faktor *Input*, *Output* dan *Impacts* (dampak).

Kebijakan dan strategi daerah mengoptimalkan potensi kewilayahan setelah lahirnya daerah otonom adalah kekuatan dan peluang daerah untuk memberikan pelayanan efektif dan efisien tersebut. Salah satu kebijakan dan strategi daerah itu adalah pemanfaatan ruang wilayah untuk kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan rumah atau pemukiman bagi masyarakat. Perkembangan situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal pemerintahan daerah memberikan dampak kepada keberhasilan mewujudkan visi dan misi daerah. Fenomena ketersediaan sumber lahan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pemangku kepentingan daerah. Pada tahapan proses kebijakan perumahan dan pemukiman merupakan proses mengaktualisasikan kebijakan dalam norma perundangan atau pendekatan politik. Berkaitan dengan kebijakan dan strategi pemerintah, (Kumorotomo, 2005) mengatakan bahwa Instrumen kebijakan adalah peraturan perundangan, Layanan umum (*public services*), Dana, Pajak, dan Imbauan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.



KESIMPULAN

Secara serempak Kebijakan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar dengan koefisien determinasi sebesar 87,1 persen. Kebijakan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan partisipasi masyarakat dapat menjelaskan variasi Pengembangan Wilayah sebesar 87,1 persen, sedangkan sisanya sebesar 12,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam model penelitian ini. Secara parsial Kebijakan Pembangunan Perumahan Pemukiman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar. Secara parsial Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(1), 1-8.
- Aminudin, 2007. Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia. Semarang : Kanisius.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bakti, C., Sihombing, B. H., Ginting, M., & Purba, J. (2020). Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 117-131
- Budiharjo, Budi.1998. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Djoko sujarto 2003. *Perencanaan Kota Baru* Penerbit ITB.
- Djaelani, M. S. (2011). Analisis Kebijakan Penataan Ruang Dan Dukungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kelestarian Lingkungan (Suatu Studi Kasus di Kota Bekasi). *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 1(2), 135-135.
- Ernan Rustiadi dkk. 2006 *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* Penerbit ITB.
- Jayadinata Johara T. 1999 *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah* Penerbit ITB Bandung.
- J.M.W. Turner 1972 *Heilbrunn Timeline of Art History*. The Metropolitan Museum of Art.
- Kumorotomo, 2005 *Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta.
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1998, *Politik Pembangunan : Sebuah Konsep, arah dan Strategi*. Tiara Wacana, Bandung
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1996, *Pembangunan dilemma dan tantangan*. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Nizar, A., Siregar, R. T., Damanik, S. E., & Purba, E. (2019). Pengaruh Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Terhadap Harga Jual Perumahan Dalam Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 1(2), 108-121



- Raldi Hendro Koeteor 1997 *Perspektif lingkungan Desa - Kota*. UI Pres.
- Sihombing, J., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2021). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 3(1), 54-69
- Sihombing, E. I., Siregar, R. T., Silalahi, M., & Modifa, I. (2022). Kajian Revitalisasi Kawasan Pematang Kota Pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 4(1), 51-64
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarsono Soni 2004 *Methodode Riset Sumber Daya Manusia Graha Ilmu*. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2004. *Methodode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Purba, R. T., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Terhadap Efisiensi Pelayanan Masyarakat Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 54 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.579>
- Tarigan, Robinson. 2010. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Yakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001 *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Widyaningsih, 2006. *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Perumahan*. Bandung: Tarsito.

